

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Kemiskinan

a. Definisi Kemiskinan

Menurut Bank Dunia, kemiskinan merupakan kekurangan dalam kesejahteraan, yang terdiri dari banyak dimensi. Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai individu yang mempunyai rata-rata pengeluaran per bulan kurang dari garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah penjumlahan antara garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan nonmakanan. Garis kemiskinan makanan adalah garis kemiskinan yang mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum makanannya sebanyak 2.100 kalori per kapita per hari, sedangkan garis kemiskinan nonmakanan mengacu pada pengeluaran individu dalam memenuhi kebutuhan minimum nonmakanan, seperti perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan (Hakim, 2006).

Hamid (2008) menyebutkan bahwa saat ini pengertian kemiskinan bukan hanya didasarkan pada aspek pendapatan dan konsumsi saja, namun mencakup aspek ketergantungan, harga diri, pendapatan, kesejahteraan dan sebagainya. Menurut *SMERU Research*

Institute, kemiskinan didefinisikan dengan melihat berbagai dimensi yaitu (Hamid, 2008):

- 1) Ketidakmampuan dalam mencukupi kebutuhan pokok (sandang, pangan dan papan).
- 2) Tidak mempunyai akses terhadap kebutuhan dasar lainnya seperti kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi.
- 3) Tidak mempunyai jaminan atas masa depan yang disebabkan tidak adanya investasi pendidikan dan keluarga.
- 4) Rentan terhadap masalah yang bersifat individual maupun massal
- 5) Mempunyai kualitas sumber daya manusia yang rendah dan sumber daya alam yang terbatas.
- 6) Tidak pernah ikut dalam kegiatan sosial di masyarakat
- 7) Tidak mempunyai akses terhadap kesempatan kerja dan pekerjaan yang mapan
- 8) Tidak mampu berusaha karena mempunyai kelainan fisik maupun mental
- 9) Ketidakmampuan sosial seperti anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok minoritas dan terpencil.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kemiskinan adalah kondisi seseorang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya.

Menurut BPS, kemiskinan pada dasarnya bisa dilihat dari dua sisi, yaitu:

1) Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut adalah kemiskinan yang berkaitan dengan tingkat pendapatan dan kebutuhan yang terbatas pada kebutuhan pokok sehingga orang tersebut dapat disebut hidup dengan layak. Kemiskinan absolut diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan seseorang dengan tingkat pendapatan yang diperlukan untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tersebut dengan tujuan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian, seseorang dikatakan miskin absolut apabila pendapatan yang diperolehnya kurang dari garis kemiskinan dan tidak mampu mencukupi kebutuhan pokoknya. Menurut BPS, nilai nominal garis kemiskinan DIY tercatat sebesar Rp 354.000 per kapita per bulan di Bulan Maret 2016.

2) Kemiskinan Relatif

Kemiskinan relatif dilihat dari aspek ketimpangan sosial. Apabila seseorang sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar minimumnya, namun masih jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan masyarakat di sekitarnya, maka orang tersebut termasuk kategori miskin relatif. Semakin tinggi kesenjangan tingkat pendapatan antara golongan atas dengan golongan bawah maka akan semakin

tinggi pula jumlah penduduk miskin. Dengan demikian, kemiskinan relatif berhubungan erat dengan distribusi pendapatan.

Sastraatmadja (2007) menyebutkan bahwa kemiskinan dapat dibedakan menjadi empat, yaitu:

- 1) *Persistent poverty*, yaitu kemiskinan yang telah kronis atau turun temurun
- 2) *Cyclical poverty*, yaitu kemiskinan yang mengikuti pola siklus ekonomi secara keseluruhan
- 3) *Seasonal poverty*, yaitu kemiskinan musiman yang sering ditemui pada kasus nelayan dan pertanian.
- 4) *Accident poverty*, yaitu kemiskinan yang tercipta karena adanya bencana alam, konflik dan kekerasan atau akibat dari suatu kebijakan yang menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan suatu masyarakat.

b. Penyebab Kemiskinan

BPS menyebutkan bahwa berdasarkan penyebabnya, kemiskinan terbagi menjadi 2 yaitu:

- 1) Kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena faktor-faktor adat atau budaya dari suatu daerah yang menyebabkan seseorang tetap berada dalam kemiskinannya.
- 2) Kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena ketidakberdayaan seseorang pada tatanan sosial yang kurang adil.

Todaro dan Smith (2008) menyebutkan bahwa kemiskinan disebabkan karena interaksi dari faktor-faktor berikut ini:

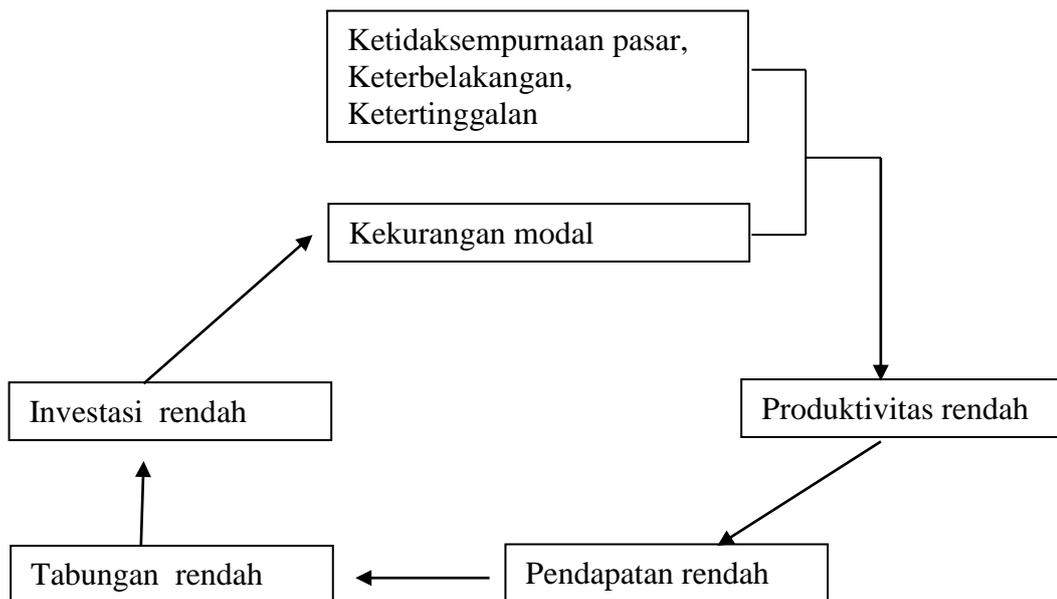
- 1) Tingkat pendapatan nasional negara terbilang rendah dan laju pertumbuhan ekonominya berjalan lambat.
- 2) Pendapatan perkapita rendah dan pertumbuhannya sangat lambat atau bahkan stagnasi.
- 3) Terjadi ketimpangan distribusi pendapatan.
- 4) Mayoritas penduduk hidup di bawah tekanan kemiskinan absolut.
- 5) Fasilitas dan pelayanan kesehatan buruk dan sangat terbatas, kekurangan gizi.
- 6) Fasilitas pendidikan dan kurikulum kurang memadai.

Sharp *et al*(2000) mengidentifikasi penyebab kemiskinan adalah:

- 1) Secara makro, kemiskinan terjadi karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya yang membuat distribusi pendapatan yang timpang, dimana penduduk miskin hanya mempunyai sumber daya yang terbatas dan kualitasnya rendah.
- 2) Kemiskinan terjadi karena perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah mengindikasikan produktivitas yang rendah yang menyebabkan rendahnya upah. Kualitas sumber daya manusia yang rendah disebabkan pendidikan yang rendah, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi atau karena keturunan.

3) Kemiskinan ada karena perbedaan akses modal.

Nurkse (1953) menyebutkan bahwa ketiga penyebab kemiskinan di atas bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan, yaitu adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar dan kurangnya modal yang menyebabkan rendahnya produktivitas. Produktivitas yang rendah menyebabkan rendahnya upah yang diterima yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berdampak pada keterbelakangan dan seterusnya. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Kuncoro (2001)

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan

Suroso (2006) menyebutkan kemiskinan yang terjadi di negara miskin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

- 1) Kemiskinan alami, yaitu kemiskinan yang disebabkan karena keadaan alam suatu wilayah atau negara yang tidak subur dan tidak mempunyai sumber daya alam potensial. Namun, faktor ini mendapat kritikan.
- 2) Kemiskinan karena penjajahan. Negara yang mengalami penjajahan dalam waktu yang lama akan menjadi miskin karena diperas oleh penjajah. Namun, faktor ini juga mendapat kritikan.
- 3) Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural. Kemiskinan ini turun temurun dari nenek moyang karena sulitnya merubah kebiasaan penduduk. Misalnya suku-suku di pedalaman.
- 4) Kemiskinan karena lokasi yang terisolasi. Kemiskinan daerah yang disebabkan karena daerah tersebut jauh dari perkotaan dan sulitnya jalur transportasi.
- 5) Kemiskinan struktural. Kemiskinan yang disebabkan karena adanya perbedaan antara kota dengan desa dan adanya persaingan yang tidak seimbang antara daerah yang mempunyai keunggulan komparatif dengan daerah yang tidak memiliki keunggulan komparatif.

Selain faktor-faktor di atas, kemiskinan pada suatu negara, juga disebabkan karena:

- 1) Matapencarian utama penduduk adalah pertanian
Negara yang mata pencarian utama penduduknya pertanian akan menyebabkan negara tersebut miskin. Hal ini disebabkan

produktivitas pertanian lebih rendah daripada sektor industri dan jasa, apalagi pertanian yang dilakukan penduduk masih bersifat tradisional dengan waktu lama dan harga jual yang kurang layak, menyebabkan rendahnya pendapatan dari sektor pertanian.

2) Ekonomi dualitas.

Perekonomian dualitas merupakan perekonomian yang berpusat pada dua pihak. Pihak pertama berpusat pada perekonomian pasar dan lainnya berekonomi pertanian. Ekonomi pasar mempunyai ciri modern, sedangkan ekonomi pertanian terbelakang. Kondisi ini menyebabkan ketimpangan pendapatan pada penduduk kota dan desa.

3) Sumber alam yang kurang terolah

Sumber daya alam yang kurang terolah menyebabkan negara tidak mampu berkembang untuk mencari sumber daya alam yang baru.

4) Pengangguran dan pengangguran tersembunyi

Pengangguran yang berpendidikan muncul karena mereka tidak mampu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan pendidikannya.

5) Ketiadaan inisiatif dan usaha

6) Tidak adanya inisiatif dan usaha dari masyarakat untuk melakukan inovasi dalam pekerjaannya menjadikan masyarakat di wilayah tersebut tidak bisa berkembang dan mampu meningkatkan pendapatannya.

7) Kelangkaan modal

Negara terbelakang mempunyai modal dan tabungan yang sangat kecil. Investasi bruto hanya sekitar 5-6% dari pendapatan nasional bruto, sedangkan negara industry mencapai kira-kira 15-20%.

8) keterbelakangan teknologi

termin dalam ongkos produksi yang tinggi, upah buruh rendah, besarnya jumlah tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih dan mahalny barang-barang modal yang dipergunakan untuk memproduksi suatu produk.

c. Ukuran Kemiskinan

BPS menggunakan pendekatan kebutuhan dasar sebagai indikator kemiskinan, yaitu:

- 1) *Head count index*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan
- 2) *Poverty gap index*, yaitu ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan.
- 3) *Poverty severity index*, yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin.

d. Teori Kemiskinan

1) Teori Neo-Liberal

Teori ini dikemukakan oleh Shanon, Spicker, Cheyne, O'Brien dan Belgrave. Teori ini berpendapat bahwa kemiskinan merupakan permasalahan individu yang muncul karena kelemahan dan pilihan individu yang bersangkutan. Kemiskinan akan hilang

dengan sendirinya apabila kekuatan pasar dibuka lebar dan pertumbuhan ekonomi ditingkatkan setinggi-tingginya. Menurut teori ini, penanggulangan kemiskinan bersifat residual, yang melibatkan keluarga, kelompok swadaya atau lembaga keagamaan, sedangkan negara akan bertindak setelah lembaga-lembaga di atas tidak mampu menanggulangi kemiskinan. Contoh penerapan teori ini adalah program Jaminan Pengaman Sosial (JPS).

2) Teori Sosial Demokrat

Menurut teori ini, kemiskinan bukan permasalahan individual melainkan permasalahan struktural. Kemiskinan disebabkan adanya ketidakadilan dan ketimpangan dalam masyarakat yang disebabkan oleh tersumbatnya akses masyarakat terhadap sumber-sumber modal. Teori ini menekankan pentingnya manajemen dan pendanaan dari negara dalam memberikan pelayanan sosial dasar bagi seluruh masyarakat.

Menurut teori ini, strategi penanggulangan kemiskinan harus bersifat institusional melalui program-program jaminan sosial dan bantuan sosial.

3) Teori Marjinal

Teori ini mengasumsikan bahwa kemiskinan di perkotaan disebabkan adanya kebudayaan kemiskinan yang tersosialisasi di masyarakat. Teori ini menyebutkan bahwa masyarakat miskin karena adanya budaya kemiskinan dengan karakter apatis,

menyerah pada nasib, sistem keluarga yang tidak mantap, pendidikan yang kurang, kurang ambisi untuk membangun masa depan, kejahatan dan kekerasan yang banyak terjadi.

4) Teori Pembangunan

Teori ini menyebutkan bahwa akar permasalahan kemiskinan adalah persoalan perekonomian dan masyarakat sebagai satu kesatuan. Asumsi dari teori ini adalah:

- a) Negara menjadi miskin karena ketiadaan atribut industrialisasi, modal, kemampuan manajerial, dan prasarana yang diperlukan untuk peningkatan ekonomi.
- b) Pertumbuhan ekonomi adalah kriteria utama pembangunan yang dianggap dapat mengatasi masalah-masalah ketimpangan.
- c) Kemiskinan akan hilang dengan sendirinya bila pasar diperluas sebesar-besarnya dan pertumbuhan ekonomi didorong setinggi-tingginya.

Berdasarkan ketiga asumsi di atas, dapat disimpulkan bahwa kemiskinan merupakan persoalan ekonomi dan pembangunan, bukan hanya persoalan budaya.

2. Industri Kecil

a. Definisi Industri Kecil

Menurut Rhodant (1983) yang dimaksud dengan industri adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengolah bahan mentah menjadi

barang jadi yang mempunyai nilai lebih tinggi. Menurut Dinas Perindustrian, industri nasional yang ada di Indonesia terbagi menjadi tiga kelompok besar, yaitu:

1) Industri dasar

Kelompok industri ini meliputi kelompok industri mesin dan logam dasar serta kelompok industri kimia dasar. Kelompok industri mesin dan logam dasar meliputi:

- a) Industri mesin pertanian
- b) Elektronika
- c) Kereta api
- d) Pesawat terbang
- e) Kendaraan bermotor, besi baja
- f) Alumunium
- g) Tembaga dan lain sebagainya

Kelompok industri kimia dasar terdiri atas:

- a) Industri pengolahan kayu dan karet alam
- b) Industri pestisida
- c) Industri pupuk
- d) Industri silikat dan sebagainya

Teknologi yang digunakan dalam kelompok industri ini adalah teknologi maju, sudah teruji dan tidak padat karya. Namun, kelompok industri ini mampu mendorong terbukanya lapangan kerja secara besar.

2) Aneka Industri

Aneka industri merupakan semua industri yang mengelola sumber daya hutan, pertanian secara luas dan lain sebagainya. Tujuan aneka industri adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan atau pemerataan, memperluas lapangan kerja, tidak padat modal dan menggunakan teknologi maju.

3) Industri Kecil

Kelompok industri ini meliputi industri pangan, sandang dan kulit, industri kimia dan bahan bangunan, industri kerajinan umum dan industri logam.

Dalam penelitian ini, kelompok industri yang akan dibahas lebih lanjut, adalah industri kecil. Industri kecil merupakan suatu usaha produktif dalam bidang produksi atau jasa-jasa, dimana modal dan tenaga kerja yang digunakan dalam jumlah yang relatif kecil (Winardi, 1994).

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan industri kecil sebagai suatu unit usaha dimana jumlah karyawannya antara 5 – 19 orang. Definisi lain menyebutkan bahwa industri kecil adalah industri yang mempunyai nilai investasi dalam perusahaan kurang dari 200 juta rupiah, dimana nilai investasi ini tidak termasuk tanah dan bangunan (Lestari, 2011).

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa industri kecil adalah suatu kegiatan yang tujuannya mengolah bahan

baku menjadi bahan jadi yang mempunyai nilai jual lebih tinggi, dimana modal yang digunakan tidak besar.

b. Kategori Industri Kecil

Departemen Perindustrian membagi industri kecil ke dalam tiga kategori, yaitu:

1) Industri kecil modern

Industri kecil modern adalah industri kecil yang telah mempunyai akses untuk meraih pemasaran yang lebih luas di pasar domestik ataupun pasar ekspor. Industri kecil modern meliputi industri kecil yang menggunakan teknologi proses madya, memiliki skala produksi yang sempit, bergantung pada dukungan dari industri besar dan menengah, sistem pemasaran dalam negeri dan ekspor, menggunakan mesin khusus dan alat-alat perlengkapan modal lainnya.

2) Industri kecil tradisional

Industri kecil tradisional mempunyai ciri-ciri antara lain menggunakan teknologi sederhana, menggunakan mesin dan alat perlengkapan produksi yang sederhana, umumnya berlokasi di pedesaan, dan mempunyai akses yang terbatas untuk meraih pasar di luar lingkungannya.

3) Industri kerajinan kecil

Industri kecil jenis ini bermacam-macam, mulai dari industri kecil yang menggunakan teknologi sederhana sampai menggunakan

teknologi proses madya, bahkan sudah ada yang menggunakan teknologi tinggi.

c. Faktor-Faktor Produksi dalam Industri Kecil

Industri dapat tumbuh dengan baik, apabila didukung oleh faktor-faktor produksi antara lain:

- 1) Faktor produksi modal, terbagi menjadi:
 - a) Modal buatan manusia, misalnya bangunan, mesin, jalan raya, dan lain sebagainya.
 - b) Lahan, termasuk tanah, air dan udara serta mineral.
- 2) Faktor produksi tenaga kerja, terbagi menjadi:
 - a) Tenaga kerja atau buruh, seperti jumlah tenaga kerja, tingkat pendidikan dan keahlian tenaga kerja.
 - b) Kewirausahaan, merupakan kecakapan seseorang dalam mengelola faktor-faktor produksi.

Untuk mengefisiensikan penggunaan faktor produksi diperlukan teknologi. Berikut ini kemajuan teknologi dalam mempengaruhi pengelolaan faktor produksi:

1) Teknologi padat karya

Apabila teknologi yang digunakan dapat meningkatkan penggunaan barang modal dibandingkan tenaga kerja.

2) Teknologi netral

Apabila teknologi yang digunakan tidak menimbulkan perubahan antara produksi modal dan tenaga kerja.

3) Teknologi padat karya

Apabila penggunaan teknologi menyebabkan penggunaan tenaga kerja lebih besar daripada penggunaan modal.

3. Infrastruktur Jalan

a. Definisi Infrastruktur

Infrastruktur merupakan suatu wadah yang digunakan untuk menyangga aktivitas-aktivitas dalam satu ruang. Menurut Grigg, infrastruktur adalah semua fasilitas fisik yang biasa disebut pekerjaan umum. Definisi lain menyebutkan bahwa infrastruktur adalah semua aset berumur panjang yang dimiliki pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta utilitas yang dimiliki oleh para pengusaha (Nurmadimah, 2012).

Istilah infrastruktur pada umumnya merujuk pada hal-hal teknis atau fisik, seperti fasilitas, antara lain jalan, kereta api, air bersih, bandara, kanal, waduk, tanggul, pengolahan limbah perlistrikan telekomunikasi, pelabuhan secara fungsional. Adanya infrastruktur akan memudahkan akses masyarakat dalam mengelola sumber daya sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam kegiatan sosial ekonominya. Peningkatan efisiensi dan produktivitas, secara tidak langsung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut sehingga kesejahteraan masyarakat meningkat. Dengan kata lain, infrastruktur mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan perekonomian masyarakat.

b. Jenis-Jenis Infrastruktur

Menurut Peraturan Presiden RI No. 67 Tahun 2005, jenis-jenis infrastruktur meliputi:

- 1) Infrastruktur transportasi, terdiri dari pelabuhan, sungai atau danau, Bandar udara, jaringan rel dan stasiun kereta api.
- 2) Infrastruktur jalan terdiri dari jalan tol dan jembatan tol.
- 3) Infrastruktur pengairan terdiri dari saluran pembawa air baku.
- 4) Infrastruktur air minum terdiri atas bangunan pengambilan air baku, jaringan transmisi, jaringan distribusi, instalasi pengolahan air minum.
- 5) Infrastruktur air limbah yang terdiri dari instalasi pengolah air limbah, jaringan pengumpul dan jaringan utama dan sarana persampahan yang meliputi pengangkut dan tempat pembuangan.
- 6) Infrastruktur telekomunikasi, meliputi jaringan telekomunikasi
- 7) Infrastruktur ketenagalistrikan terdiri dari pembangkit, transmisi atau distribusi tenaga listrik
- 8) Infrastruktur minyak dan gas bumi yang terdiri dari pengolahan, penyimpanan, pengangkutan, transmisi atau distribusi minyak dan gas bumi.

Jenis infrastruktur yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah infrastruktur jalan.

c. Definisi Jalan

Jalan merupakan jalur yang direncanakan untuk lalu lintas kendaraan dan orang, untuk saluran air minum, saluran air limbah, jaringan listrik, telepon, gas dan lain sebagainya. Jalan raya berpotensi sebagai penyedia akses transportasi jasa dan barang ke seluruh wilayah.

d. Klasifikasi jalan

Menurut wewenang pembinaan, jalan terbagi menjadi jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten, jalan kotamadya, jalan desa dan jalan khusus. Jalan nasional adalah jalan yang tidak mempunyai peranan dominan dalam pengembangan ekonomi, namun berperan dalam menjamin kesatuan wilayah dan keutuhan nasional. Jalan propinsi yaitu jalan yang tidak berpengaruh dalam kepentingan ekonomi, namun berperan dalam menjamin terselenggaranya pemerintahan yang baik dalam pemerintah daerah Tingkat I.

Jalan kabupaten adalah jalan yang walaupun tidak dominan terhadap pengembangan ekonomi, namun memiliki fungsi dalam menjamin terselenggarakan pemerintahan dalam pemerintah daerah. Jalan kotamadya merupakan cabang jalan sekunder di dalam kotamadya. Jalan desa merupakan jaringan jalan sekunder di dalam desa, merupakan hasil swadaya. Jalan khusus merupakan jalan yang dibangun dan dipelihara oleh institusi/badan hukum/perorangan untuk melayani kepentingan khusus.

e. Peranan Jalan

Menurut UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan disebutkan bahwa jalan mempunyai peran sebagai berikut:

- 1) Prasarana transportasi yang mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan rakyat.
- 2) Prasarana distribusi barang dan jasa yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara
- 3) Sebagai kesatuan sistem jaringan jalan yang menghubungkan dan mengikat wilayah republic Indonesia (Sudaryadi, 2007).

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa infrastruktur jalan merupakan salah satu jenis infrastruktur yang penting bagi pembangunan ekonomi. Sudaryadi (2007) menyebutkan bahwa dalam konteks pembangunan ekonomi, jaringan jalan merupakan infrastruktur wilayah yang sangat dibutuhkan untuk kelancaran arus faktor produksi dan pemasaran hasil produksi. Secara tidak langsung, infrastruktur jalan mampu mendorong produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kondisi sosial budaya masyarakat. Secara langsung, infrastruktur jalan berhubungan dengan sektor konstruksi, yaitu akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Dengan demikian keberadaan infrastruktur jalan yang baik dapat menciptakan stabilitas berbagai aspek dalam kehidupan masyarakat yang mampu menunjang laju pembangunan

nasional (Sudaryadi, 2007). Oleh karena itu, infrastruktur jalan harus dipelihara. Purwoto dan Kurniawan (2009) menyebutkan beberapa manfaat pemeliharaan infrastruktur jalan yaitu:

- a. Perubahan biaya relative dari sarana transportasi tertentu terhadap sarana transportasi lainnya.
- b. Meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat
- c. Meningkatkan ketersediaan sarana transportasi
- d. Meningkatkan kualitas perjalanan (kecepatan, kenyamanan, kepercayaan) yang dihasilkan dari peningkatan kualitas sarana maupun teknologi infrastrukturnya.
- e. Memberikan pengaruh pada tata guna lahan sebagai dampak migrasi antar daerah dan perubahan pola pemukiman.
- f. Meningkatkan aktivitas ekonomi yang pada akhirnya menimbulkan perubahan pola dan struktur konsumsi masyarakat
- g. Perubahan demografis
- h. Perubahan perilaku operasional industri setempat.

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan suatu kebutuhan penting, karena mampu mempengaruhi kesejahteraan masyarakat, melalui pengembangan kawasan sentra produksi, kuliner, pariwisata dan lain sebagainya yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kemiskinan.

4. Anggaran Pendidikan

a. Definisi Anggaran Pendidikan

Penyelenggaraan pendidikan akan berjalan dengan baik, apabila ditunjang dengan keuangan dan pembiayaan yang juga baik. Untuk itu, diperlukan anggaran untuk menunjang kegiatan pendidikan. Penganggaran adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menyusun anggaran. Anggaran merupakan rencana operasional yang dinyatakan secara angka dalam bentuk satuan uang yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam kurun waktu tertentu (Fattah, 2006). Munandar (2005) mendefinisikan anggaran sebagai suatu program yang dibuat secara sistematis, yang mencakup seluruh aktivitas organisasi, yang dinyatakan dalam unit (kesatuan) moneter dan digunakan untuk periode tertentu di masa yang akan datang.

Menurut pasal 1 butir 40 UU No. 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas UU No. 22 tahun 2011 tentang APBN TA 2012, anggaran pendidikan adalah alokasi anggaran pada fungsi pendidikan yang dianggarkan melalui kementerian negara/lembaga, alokasi anggaran pendidikan melalui transfer ke daerah dan alokasi anggaran pendidikan melalui pengeluaran pembiayaan, termasuk gaji pendidik tetapi tidak termasuk anggaran pendidikan kedinasan, untuk membiayai penyelenggaraan pendidikan yang menjadi tanggung jawab pemerintah.

b. Tujuan Anggaran Pendidikan

Tujuan anggaran pendidikan antara lain:

- 1) Menjamin keberlangsungan program pendidikan bagi generasi berikutnya, sebagai bentuk pertanggungjawaban antargenerasi yang pengelolaannya menggunakan mekanisme dana bergulir.
- 2) Sebagai dana cadangan pendidikan yang ditujukan untuk mengantisipasi keperluan rehabilitasi fasilitas pendidikan yang rusak akibat bencana alam.

c. Komponen-Komponen dalam Anggaran Pendidikan

Pemerintah menetapkan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja. Komponen-komponen yang dimasukkan dalam anggaran pendidikan meliputi prasarana (bangunan), penyediaan guru, pelatihan guru yang ada agar dapat memenuhi syarat kompetensi sesuai undang-undang yang ditetapkan, penyediaan buku dan alat peraga untuk semua sekolah, menyempurnakan sistem pengawasan dan evaluasi sekolah, penyesuaian kurikulum pada keadaan lokal, penyediaan dana penyelenggaraan yang wajar dan cukup dan perkuatan dinas-dinas pendidikan di seluruh kabupaten/kota.

d. Implementasi Anggaran Pendidikan 20% di Pusat dan Daerah

Pemerintah memprioritaskan penggunaan anggaran 20% dari APBN bidang pendidikan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025 untuk meningkatkan kesejahteraan guru dan

dosen, menuntaskan wajib belajar 9 tahun dengan kualitas yang baik, murah dan terjangkau, akses mutu dan relevansi pendidikan menengah dan pendidikan tinggi yang lebih baik, serta mutu dan relevansi penelitian yang lebih baik, beasiswa kepada siswa/mahasiswa berprestasi untuk mendapatkan jaminan melanjutkan pendidikan di mana pun, memberikan perhatian pada pendidikan nonformal dan penguatan tata kelola.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian Tresya, Sahmin dan Amir (2014) di Provinsi Gorontalo. Menunjukkan bahwa belanja publik di bidang pendidikan dan kesehatan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan sedangkan belanja publik di bidang infrastruktur tidak berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Widodo, Waridin dan Johanna (2011) di Provinsi Jawa Tengah menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi IPM atau kemiskinan, namun secara bersama-sama mempengaruhi pengurangan kemiskinan. Penelitian Marta (2005) di Sumatera Barat menunjukkan bahwa tingkat pendidikan dan perkembangan industri kecil berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Penelitian Jamco (2014) di Kabupaten Maluku Tenggara menunjukkan bahwa kenaikan pertumbuhan ekonomi, dan infrastruktur berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan, sedangkan pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh Jumlah Industri Kecil terhadap Tingkat Kemiskinan

Industri merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mengelola bahan baku menjadi barang jadi yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Salah satu jenis industri yang ada di masyarakat adalah industri kecil. Industri kecil merupakan industri yang jumlah karyawannya antara 5 - 9 orang dan modal yang dimilikinya relatif kecil. Industri kecil dapat menyerap tenaga kerja, karena keberadaannya yang berada di pedesaan, sehingga tenaga kerja yang mempunyai pendidikan rendah dapat tersalurkan. Semakin banyaknya tenaga kerja dengan pendidikan rendah yang dapat terserap oleh industri kecil diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Hal ini disebabkan karena dengan bekerja, masyarakat akan memperoleh upah sehingga mampu mencukupi kebutuhan dasarnya dan mampu menabung sehingga kesejahteraan meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi tingkat kemiskinan. Dengan demikian, semakin banyak jumlah industri kecil didirikan akan semakin menurunkan tingkat kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H1 : Jumlah industri kecil berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

2. Pengaruh Infrastruktur terhadap Tingkat Kemiskinan

Infrastruktur merupakan suatu sarana fisik yang mendukung pembangunan ekonomi suatu wilayah agar dapat terlaksana. Infrastruktur terdiri dari beberapa komponen, namun yang cukup dominan adalah transportasi. Pembangunan infrastruktur jalan akan mendorong pemerataan distribusi pendapatan masyarakat. Dengan pembangunan infrastruktur jalan yang baik, masyarakat akan semakin mudah dalam menyalurkan barang-barang produksi ke berbagai wilayah. Jalan yang baik juga dapat menarik minat investor untuk menanamkan investasinya di wilayah tersebut sehingga akan memicu pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang pesat akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan kata lain, semakin baik infrastruktur jalan, maka akan semakin rendah tingkat kemiskinan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H2 : Infrastruktur berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

3. Pengaruh Anggaran Pendidikan terhadap Tingkat Kemiskinan

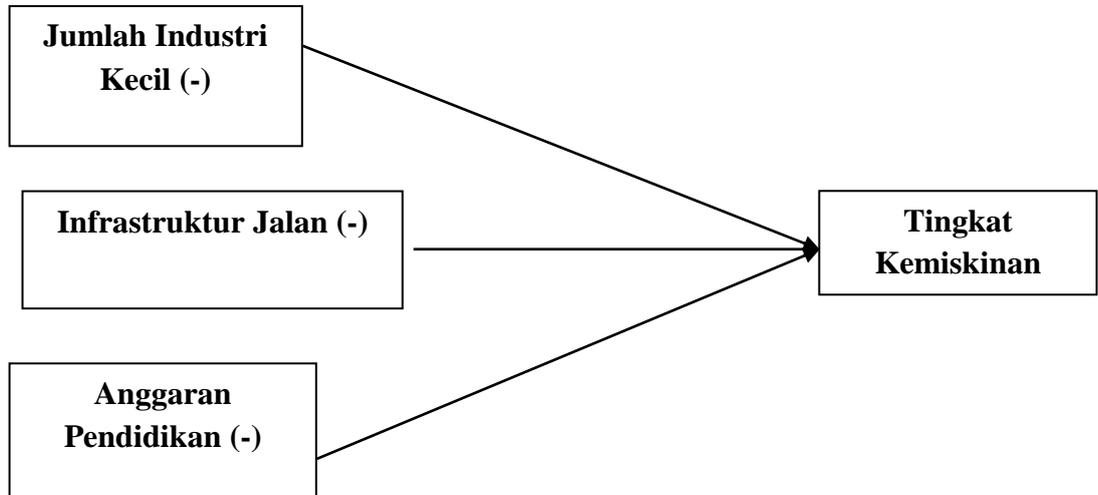
Pendidikan merupakan salah satu bentuk investasi sumber daya manusia. Tingkat pendidikan juga salah satu komponen dalam lingkaran setan kemiskinan. Masyarakat yang mempunyai pendidikan rendah akan mempunyai produktivitas yang juga rendah yang menyebabkan rendahnya pendapatan yang diterima. Dengan pendapatan yang rendah, masyarakat

tidak mampu mencukupi kebutuhan dasar hidupnya seperti sandang, pangan, dan papan. Hal ini menyebabkan masyarakat hidup di bawah garis kemiskinan. Dengan kata lain, pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan untuk mengurangi kemiskinan. Peningkatan kualitas pendidikan diperlukan anggaran yang besar. Semakin besar anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, tingkat kemiskinan akan semakin berkurang. Hal ini disebabkan karena dengan alokasi anggaran yang besar, pemerintah dapat membangun program-program yang terkait dengan pendidikan, misalnya pembangunan sekolah-sekolah, pemberian beasiswa pendidikan untuk masyarakat miskin, perbaikan kurikulum dan lain sebagainya. Dengan semakin tingginya alokasi anggaran pendidikan, diharapkan masyarakat dapat mempunyai pendidikan yang tinggi sehingga dapat meningkatkan produktivitasnya yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disusun hipotesis sebagai berikut:

H3 : Anggaran pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan

Dari uraian di atas untuk memudahkan penelitian yang akan dilakukan serta untuk memperjelas kerangka pemikiran dalam penelitian ini, disusunlah gambar kerangka pemikiran yang skematis:



Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran